

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa pada bab sebelumnya, peneliti akan menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil temuan data di lapangan. Kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Dari hasil analisa tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. disimpulkan bahwa secara umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2016 rata-rata telah tercapai **97.04** atau kriteria penilaiannya **“Sangat Tinggi”** Selanjutnya dalam hal peningkatan kinerja, Setiap tahun BKD Bantul juga menerapkan sasaran kinerja pegawai, dimana dengan adanya sasaran kinerja pegawai ini maka dilakukan kontrak tertulis antara seorang pegawai dengan atasannya terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan selama satu tahun, ditandatangani pada bulan januari tahun berjalan, dan akan menjadi bahan evaluasi penilaian pada bulan desember di akhir tahun.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam terpenuhinya kompetensi ASN sesuai standar adalah Peraturan Bupati tentang Analisa Jabatan Nomor 97 Tahun 2016 hanya menyebut jenjang pendidikan belum sampai ke jurusan pendidikan dan jumlah yang dibutuhkan.

Faktor penghambat dari Indikator Kinerja Pencapaian IKP (Indeks Kepuasan Pegawai) Tahun 2016 ini adalah Quisioner IKP yang disebarkan belum semua materi pertanyaanya terisi/dijawab lengkap.

B. Saran

1. Strategi untuk kedepannya adalah Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dengan melakukan penempatan SDM sesuai dengan analisa jabatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Melakukan strategi ditahun yang akan datang dengan meningkatkan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan mengadakan pelayanan satu pintu sehingga pelayanan menjadi terpusat dan sistem aplikasi kepegawaian secara terintegrasi dan tersentralisasi, serta selaras dengan kebijakan dan regulasi optimalisasi *e-Government* di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan membangun melalui Sistem Aplikasi Terpadu BKD Kabupaten Bantul.